

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014-2019. Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai lembaga yang berkompeten dalam pelaksanaan pengelolaan manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil berupaya terus menerus untuk dapat menjadi lembaga yang amanah, profesional, dan akuntabel di dalam pengelolaan manajemen SDM Aparatur agar dapat menyelesaikan tugas pokok dan fungsi secara berkesinambungan, terukur, tepat, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan norma/ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu dalam penyusunan rencana kerja yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur berupaya melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang kepegawaian, peningkatan kualitas pengetahuan dan keterampilan SDM Aparatur, peningkatan kualitas penataan Pegawai Negeri Sipil, peningkatan kualitas informasi manajemen kepegawaian dan peningkatan kesejahteraan pegawai melalui program dan kegiatan yang terencana dan terintegrasi sesuai dengan tuntutan masyarakat yaitu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Proses penyusunan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 didasarkan kepada Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014-2019 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2017, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019, dimana rencana programnya disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 58 Tahun 2007, yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
4. Program Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
5. Program Penyelenggaraan Pelayanan Manajemen Aparatur
6. Program Pengembangan Data Informasi
7. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur tersebut selanjutnya menjadi pedoman dalam pengusulan pendanaan melalui Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);

2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 1 Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 4 Tahun 2008 Seri E);
13. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga2 Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 3 Tahun 2008 Seri D);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur;
16. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019
17. Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 dimaksudkan sebagai upaya untuk mengarahkan semua unsur-unsur kekuatan dan faktor-faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan jangka pendek serta sebagai pedoman umum dan arahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi lembaga Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur selama tahun 2017.

### **1.4 Permasalahan**

#### **1. Masalah Pengembangan Budaya Kerja**

Kendala internal yang dihadapi dalam upaya mewujudkan misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur bersumber juga pada belum optimalnya penerapan nilai-nilai budaya kerja terutama budaya pelayanan sebagai satu sistem keyakinan, nilai-nilai dan norma-norma yang disepakati dan dijadikan pedoman tingkah laku. Akibatnya berbagai masalah yang berhubungan dengan adaptasi eksternal dan integrasi internal belum sepenuhnya mengarah kepada perubahan sikap dan perilaku serta motivasi kerja untuk menciptakan iklim kerja yang berorientasi pada etos kerja dan produktifitas yang diharapkan.

#### **2. Masalah Peningkatan Koordinasi Internal**

Keterpaduan perencanaan dalam RENSTRA, baik keterpaduan program maupun sasaran, memerlukan kemantapan koordinasi dalam pelaksanaan, pemantauan, sinkronisasi dan evaluasi pada tataran operasionalnya, khususnya koordinasi antar bidang dan internal bidang. Oleh karenanya dengan semakin meningkatnya tuntutan peningkatan kinerja pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan manajemen aparatur, diperlukan pemantapan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi internal Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur yang berkelanjutan.

### 3. Masalah peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur sipil negara

Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur sipil negara Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur mendesak untuk dilaksanakan agar tetap mampu meningkatkan keterampilan, pengetahuan, keahlian dan perilaku yang terus berkembang sesuai dinamika perubahan, terutama dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mulai Januari 2014 ini serta peraturan-peraturan lain yang mengikutinya. Kompetensi aparatur yang perlu mendapat perhatian adalah terutama dalam aspek E 3. *Pertama*; pemberdayaan (*empower*) yaitu memberi kesempatan agar mampu mengembangkan bakat dan keterampilan dan kontribusinya pada institusi dan masyarakat. *Kedua*; pembelajaran (*educate*) yaitu bekal pembelajaran untuk menambah pengetahuan dalam menciptakan lingkungan kerja yang dinamis. *Ketiga*; pencerahan (*enlighten*) yaitu membuka wawasan aparatur sipil negara Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur untuk berpikir maju, dinamis dan kreatif yang mengarah pada perubahan peningkatan kinerja organisasi.

### 4. Masalah Optimalisasi Hasil Program dan Kegiatan

Dampak dari belum optimalnya konsistensi sasaran program dan kegiatan di Badan Kepegawaian Daerah serta belum optimalnya komitmen untuk berbuat yang terbaik dari seluruh jajaran organisasi, dikhawatirkan akan dapat menghambat tercapainya sasaran hasil atau manfaat (*outcome*) yang diharapkan dari setiap kegiatan operasional dan cenderung menghasilkan *output* semata.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Dokumen Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini memuat : Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, dan Sistematika Penulisan

### **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

Bab ini memuat : Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur

### **BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Bab ini memuat : Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur yang akan dilaksanakan Tahun 2017 mengacu pada kesesuaian dengan dokumen RKPD dan dokumen Renstra Tahun 2014 - 2019

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini memuat : Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu :

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran :

**Input** : Dana sebesar Rp. **3.336.083.540,-** terealisasi sebesar Rp. **3.324.641.508,-** Persentase capaiannya **100 %**

**Output** : - Persentase ketepatan penyelesaian administrasi surat sesuai SOP.  
- Persentase fasilitasi penyediaan makanan dan minuman dalam menunjang kegiatan BKD dan sekretariat sesuai dengan SOP.

**Outcome** : Indeks Kepuasan Masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor.

#### Evaluasi kinerja :

- Perlu adanya SOP tentang pelayanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelayanan yang jelas di lingkungan internal Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur
- Peningkatan efektifitas pelayanan di internal Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu:

- a. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana :

**Input** : Dana sebesar **Rp. 1.419.800.000,-** terealisasi sebesar **Rp. 1.347.857.821,-** Persentase capaiannya **95 %**

**Output** : - Persentase Penerbitan Buletin BKD.



- Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor.

**Outcome** : Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi

**Evaluasi kinerja :**

- Perlu adanya peningkatan kualitas penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana aparatur karena bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur

b. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana :

**Input** : Dana sebesar **Rp. 2.865.688.000** terealisasi sebesar **Rp. 2.861.454.926**. Persentase capaiannya **100 %**

**Output** : Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana kantor.

**Outcome** : Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi

**Evaluasi kinerja :**

- Perlu adanya peningkatan kualitas pemeliharaan rutin berkala khususnya pemeliharaan rutin berkala pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana karena bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur

3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dengan 2 (dua) kegiatan yaitu :

a. Koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah :

**Input** : Dana sebesar **Rp. 772.146.000** terealisasi sebesar **Rp. 749.883.232**. Persentase capaiannya **97 %**

**Output** : Persentase dokumen rumusan kebijakan kepegawaian

**Outcome** : Persentase kelembagaan yang tepat fungsi.

**Evaluasi kinerja :**

- Optimalisasi implementasi rumusan kebijakan kepegawaian sesuai dengan Undang-Undang ASN (Aparatur Sipil Negara)

b. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

**Input** : Dana sebesar **Rp. 1.043.282.500,-** terealisasi sebesar **Rp. 1.015.581.660.** Persentase capaiannya **97 %**

**Output** : Persentase pelayanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu

**Outcome** : Persentase kelembagaan yang tepat fungsi.

**Evaluasi kinerja :**

- Optimalisasi pelayanan kepegawaian internal Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur dengan ukuran nilai IKM Internal.

4. Program Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu :

a. Penyusunan dokumen perencanaan :

**Input** : Dana sebesar **Rp. 275.000.000** terealisasi sebesar **Rp. 274.522.450.** Persentase capaiannya **100%**

**Output** : Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang sesuai aturan dan tepat waktu

**Outcome** : Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu.

**Evaluasi kinerja :**

- Konsistensi dokumen penyelenggaraan dengan RPJMD harus lebih di optimalkan

b. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana program dan anggaran :

**Input** : Dana sebesar **Rp. 500.000.000** terealisasi sebesar **Rp. 499.358.510,-** Persentase capaiannya **100%**

**Output** : Persentase laporan hasil pelaksanaan kegiatan

**Outcome** : Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu.

**Evaluasi kinerja :**

- Optimalisasi hasil pelaksanaan kegiatan dengan target yang telah di tetapkan dengan indikator tujuan da sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan
- c. Penyusunan, pengembangan, pemeliharaan dan pelaksanaan sistem informasi data :

**Input** : Dana sebesar **Rp. 180.000.000** terealisasi sebesar **Rp. 180.000.000,-** Persentase capaiannya **100%**

**Output** : Jumlah jaringan fiber optik

**Outcome** : Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu.

**Evaluasi kinerja :**

- Optimalisasi jaringan untuk mengakses informasi yang terkini dan terupdate
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu:
- a. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya :

**Input** : Dana sebesar **Rp.2.200.000.000,-** terealisasi sebesar **Rp2.034.035.120,-** Persentase capaiannya **92%**

**Output** : - Persentase kegiatan ujian dinas dan penyesuaian ijazah  
- Persentase ujian seleksi gol III/d ke IV/a.  
- Persentase Bimtek Kepegawaian  
- Persentase fasilitasi tugas belajar  
- Persentase penyusunan rancangan peraturan gubernur

**Outcome** : Persentase penataan SDM aparatur sesuai formasi .

**Evaluasi kinerja :**

Untuk tingkat pengembangan kompetensi SDM aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur telah melakukan kegiatan – kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi SDM aparatur dan juga pengembangan karir

diantaranya kegiatan ujian dinas, penyesuaian ijazah dan pengembangan kompetensi, tugas belajar dll.

### Data Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur

No	Uraian	2014	2015
1.	Ujian Dinas	110	94
2.	Ujian Penyesuaian Ijazah (KPPI)	103	66
3.	Seleksi pangkat III/d ke IV/a	88	36
4.	Tugas Belajar S1,S2,S3	45	21
5.	Izin Belajar	160	178
6.	Pembekalan Jiwa Entrepreneurship		
	- Angkatan I	-	25
	- Angkatan II	-	25
	- Angkatan III	-	23
	- Angkatan IV	-	24
<b>JUMLAH</b>		506	314

Sumber Data : Bidang Forbang subbid pengembangan Pegawai 31 Desember 2015

Sebagaimana diatas untuk pengembangan kompetensi pegawai pada Tahun 2015 berjumlah 314 pegawai dengan target 70% atau target 14.569 pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi dari 20.813 PNS seluruh Pemprov jatimdan realisasi 60% dengan asumsi aparatur yang telah mengikuti pengembangan kompetensi sebesar 13.487 PNS dengan data pendukung pegawai yang ikut dan lulus pengembangan kompetensi dari tahun 2009 s/d 2015.

b. Perencanaan kepegawaian dan formasi.

**Input** : Dana sebesar **Rp. 656.189.000,-** terealisasi sebesar **Rp.596.712.620,-** Persentase capaiannya **91 %**

**Output** : Persentase Bimbingan Teknis Kepegawaian

**Outcome** : Persentase penataan SDM aparatur sesuai formasi dan kebutuhan.

**Evaluasi kinerja :**

Optimalisasi kegiatan perencanaan kepegawaian antara lain pemetaan pegawai berbasis jabatan untuk lima tahun mendatang.

c. Penyelenggaraan Peningkatan Disiplin dan Kode Etik Pegawai Serta Penghargaan

**Input** : Dana sebesar Rp. **1.030.464.500,-** terealisasi sebesar Rp. **961.645.045,-** Persentase capaiannya **93 %**

**Output** : Persentase penyelesaian pemberian/penolakan izin perceraian dan perkawinan pegawai, Kegiatan BinteK, Rekomendasi Bapertarum, Pembekalan PNS menjelang Purna Tugas, Penganugrahan Satyalancana Karya Satya, Verifikasi LP2P, Pelepasan PNS Purna Tugas, Penyelesaian Ketaspenan

**Outcome** : Persentase penetapan pemberian, penghargaan kinerja pegawai yang obyektif, transparan, dan akuntabel.

**Evaluasi kinerja :**

- Peningkatan Disiplin dan kode etik pegawai haruslah meningkat dengan berbagai upaya seperti pembinaan pegawai, konseling pegawai, sosialisasi disiplin pegawai di seluruh Pegawai Provinsi Jawa Timur.

## Hasil Kegiatan Penyelenggaraan Peningkatan Disiplin dan Kode Etik Pegawai serta Penghargaan

JABATAN	REALISASI 2015						JUMLAH TOTAL	%
	RINGAN		SEDANG		BERAT			
	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA		
<b>FUNGSIONAL UMUM</b>								
Golongan IV								
Golongan III					2	1	3	0.01
Golongan II					4	1	5	0.02
Golongan I					1		1	0.00
<b>FUNGSIONAL TERTENTU</b>								
Ahli Utama								
Ahli Madya								
Ahli Muda								
Ahli Pertama								
Penyelia								
Pelaksana Lanjutan / Mahir								
Pelaksana Terampil								
Pemula								
<b>STRUKTURAL</b>								
Eselon I								
8 Eselon II								
Eselon III					2		2	0.01
Eselon IV				1	1		2	0.01
<b>JUMLAH</b>				1	10	2	13	0.06

NO	URAIAN	2014	2015	KET
<b>1.</b>	<b>Penjatuhan Hukuman PNS</b>			
	<b>Pelanggaran Displin PNS :</b>			
	1. Ringan	0	0	
	2. Sedang	10	1	
	3. Berat	26	4	
	<b>Pelanggaran Pidana</b>			
	<b>PNSD Provinsi Jawa Timur :</b>			
	1. Kriminal	0	2	
	2. Penyalahgunaan Jabatan/Wewenang	0	0	
	3. Korupsi	0	1	
	4. Narkoba	1	1	
	<b>PNSD Kabupaten/Kota :</b>			
	1. Kriminal	1	0	
	2. Penyalahgunaan Jabatan/Wewenang	0	0	
	3. Korupsi	3	2	
	4. Narkoba	0	0	

<b>2.</b>	<b>Usul Pertimbangan :</b>			
	1. BAPEK	1	2	
	2. Inspektorat	10	0	
<b>3.</b>	<b>Perceraian</b>			
	1. Pemberian Izin Perceraian	25	13	
	2. Penolakan Izin Perceraian	1	1	
<b>4.</b>	<b>Konseling PNS</b>	0	3	
<b>5.</b>	Izin Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri (Tidak termasuk yang melalui Biro Administrasi Kerjasama)	138	95	
<b>6.</b>	Ibadah Haji	62	43	
<b>7.</b>	Ibadah Umroh	211	224	
<b>8.</b>	Cuti besar/Cuti di luar tanggungan Negara/bebas tugas	8	21	

6. Program Penyelenggaraan Pelayanan Manajemen Aparatur dengan 5 (lima) kegiatan yaitu :

a. Seleksi rekrutmen pegawai yang transparan dan bebas KKN melalui sistem CAT :

**Input** : Dana sebesar Rp. **1.256.197.000,-** terealisasi sebesar Rp.**821.538.234,-** Persentase capaiannya **65 %**

**Output** : - Persentase pelaksanaan rekrutmen CPNS  
- Persentase pelaksanaan seleksi capra IPDN

**Outcome** : Persentase penataan SDM aparatur sesuai formasi kebutuhan

**Evaluasi kinerja** :

Tidak disetujuinya usulan formasi pegawai dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan ada perintah oleh Pemerintahan pusat hal ini dari Kementerian PAN dan RB dengan surat Menteri PAN dan RB Nomor: B/2163/M.PAN-RB/06/2015, tentang penundaan penambahan pegawai ASN 2015, sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur ***tidak melakukan Rekrutmen CPNS.***

b. Penataan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi

**Input** : Dana sebesar Rp. **3.281.664.100,-** terealisasi sebesar Rp.**3.049.572.017,-** Persentase capaiannya **93 %**

**Output** : - Persentase kegiatan baperjakat yang difasilitasi  
- Persentase kegiatan pelantikan dan sertijab yang difasilitasi  
- Persentase penyelesaian proses pensiun  
- Persentase penyelesaian proses kenaikan pangkat PNS kab/kota dan SKPD Provinsi Jawa Timur  
- Persentase penyelesaian proses mutasi PNS antar SKPD, Kab/Kota dan antar provinsi  
- Persentase pengangkatan jabatan fungsional tertentu

**Outcome** : Persentase penataan SDM aparatur sesuai dengan formasi kebutuhan

**Evaluasi kinerja** :

**Rekapitulasi Perpindahan Pegawai  
di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur**

No	Uraian	2014	2015
1	Perpindahan antar SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur	77	48
2	Perpindahan antar Kabupaten/Kota di Jawa Timur	527	475
3	Antar Provinsi (usulan)	323	308
4	Mutasi masuk menjadi PNSD Provinsi Jawa Timur	124	95
<b>JUMLAH</b>		1.051	926

*Sumber Data : Bidang Mutasi subbid pangkat, pindah, pensiun Pegawai 31 Desember 2015*

Salah satu upaya untuk mengisi formasi kebutuhan pegawai yang sesuai dengan kompetensi antara lain menerima pelimpahan pegawai dari luar menjadi PNS daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun demikian untuk dapat diterima dan melimpah menjadi PNSD Provinsi Jawa Timur yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi semua proses mutasi



harus dilakukan dengan tes bakat dan kemampuan. Dalam rangka penataan pegawai yang sesuai kompetensi dan kebutuhan ada 926 PNS yang beralih status menjadi PNS Daerah Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan sekitar 11.8 % dari tahun 2014 dari sebelumnya sebanyak 1.051 pegawai .

Pengalihfungsian pegawai negeri sipil (PNS) dari jabatan fungsional umum (JFU) ke jabatan fungsional tertentu (JFT) merupakan aktivitas penataan pegawai dalam rangka memenuhi kekurangan akan tenaga fungsional tertentu (JFT). BKD Provinsi telah berupaya untuk memenuhi kekurangan tenaga pegawai dengan Jabatan Fungsional tertentu JFT, berbagai upaya mulai dari pemberian informasi secara terbuka, menawarkan kepada SKPD yang kelebihan pegawai dengan jabatan fungsional umum (JFU), dan memberikan fasilitas kepada pegawai untuk program diklat fungsional tertentu, dan mempermudah penyelesaian administrasi kepada pegawai yang akan beralihfungsi dari jabatan fungsional umum ke fungsional tertentu, berikut hasil pengalihfungsian dari jabatan fungsional umum ke jabatan fungsional tertentu

#### **Rekapitulasi pengalihfungsian JFU ke JFT**

No	Uraian	2014	2015
1	Pengalihfungsian Jabatan Fungsional Umum (JFU) ke Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	89	198
<b>JUMLAH</b>		89	198

*Sumber Data : Bidang Mutasi subbid jabatan Pegawai 31 Desember 2015*

Untuk memenuhi kekurangan kebutuhan akan jabatan fungsional tertentu (JFT) dalam rangka penataan pegawai, salah satunya melalui alihfungsi dari jabatan fungsional umum (JFU) dan formasi JFT yang belum ditetapkan dalam jabatannya sampai dengan akhir 2015 terealisasi penetapan pengangkatannya sebanyak 198 pegawai atau 222 %

Pengalihan fungsi dari jabatan fungsional umum ke jabatan fungsional tertentu dan untuk mengarahkan seseorang PNS untuk dialihfungsikan dari jabatan umum ke jabatan fungsional diperlukan proses analisis kepegawaian yang cukup panjang, sosialisasi dan pengenalan akan jabatan fungsional tertentu, analisis kebutuhan dana, analisis kebutuhan diklat fungsional, dan dilakukan uji psikotest untuk mencari bakat/penjurusan.

Pada tahun 2009 s/d 2011 tidak menargetkan, baru pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 menargetkan berdasarkan pada hasil pemetaan pegawai yang menyatakan kekurangan tenaga fungsional tertentu, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur berupaya untuk menutupi kekurangan tenaga fungsional tertentu tersebut, dengan menawarkan, mensosialisasikan, dan selanjutnya dilakukan pendidikan jabatan fungsional tertentu sebagai salah satu syarat pengangkatan dalam jabatan fungsional tertentu.

Penataan SDM aparatur yang berkualitas secara terencana, terarah dan rasional, terutama di dalam penempatan pejabat struktural, dapat di mulai dengan melakukan proses analisis pegawai atau penilaian pegawai secara ketat, selektif dengan menyediakan ruang yang lebih terbuka untuk berkompetensi. Hal tersebut dimaksudkan agar dalam penetapan dan penempatan pegawai yang diangkat dalam jabatan struktural dapat dihasilkan pejabat sesuai kebutuhan dan kompetensinya, dalam hal ini yang memiliki keahlian, pengetahuan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan.

Sebagai pengelola manajemen SDM aparatur, BKD Provinsi Jawa Timur harus mempunyai peranan yang besar dalam hal penataan dan penempatan pegawai yang diangkat dalam jabatan struktural, agar dihasilkan pejabat struktural sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya baik itu tingkat pendidikan, tingkat kemampuan, tingkat keahlian dengan selektif dengan berbagai upaya yang telah dilakukan mulai dari evaluasi kinerja PNS, uji kompetensi bagi PNS III/c ke atas, evaluasi dan analisis oleh tim Baperjakat, dan di masa mendatang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka untuk lebih transparan penataan dalam jabatan struktural akan dilaksanakan melalui pengisian lowongan jabatan yang lowong secara terbuka.

Data SIMPEG Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Desember 2015 menunjukkan bahwa jumlah total pejabat struktural sebanyak 538 PNS yang diangkat dengan jabatan struktural dan telah ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan yang terdiri dari Eselon I.b, eselon II.a, eselon II.b, eselon III.a, Eselon III.b, dan eselon IV.a., sampai dengan Desember 2015 sebanyak 538 pejabat struktural telah ditetapkan pengangkatan dalam jabatan telah sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan, baik itu kriteria syarat jabatan, pengalaman, latar belakang pendidikan, dan kediklatan yang pernah diikuti oleh seorang pegawai yang akan diangkat dalam jabatan struktural, dan juga sudah melalui proses analisis dan evaluasi oleh Tim Baperjakat serta berpedoman pada Perka BKN tentang syarat dan standar jabatan, sehingga pada tahun 2015 BKD Provinsi bersama tim Baperjakat telah menetapkan pejabat struktural mulai eselon I sampai dengan IV sebanyak 538 pejabat struktural .

#### **Data Pendistribusian Pejabat Struktural Hasil Tim Baperjakat**

No	Uraian	2014	2015
1.	Pendistribusian pejabat struktural hasil Tim Baperjakat	1.922	538
<b>JUMLAH</b>		1.922	538

*Sumber Data : Bidang Mutasi subbid pangkat,pindah dan pensiun Pegawai 31 Desember 2015*

Perhitungan data tersebut di atas (Mutasi SKPD, Mutasi masuk Pemprov, pengalihfungsian JFU ke JFT, pendistribusian pejabat struktural hasil tim baperjakat ditambah dengan pegawai yang sudah sesuai dengan kompetensinya berjumlah 19.151 dikurangi dengan PNS yang tidak sesuai jabatan sebanyak 789 pegawai belum diangkat dalam jabatan fungsional karena terkendala beberapa hal sebagai berikut:

1. Belum tersedianya diklat dasar bagi pejabat fungsional yaitu sebanyak 88 orang (11,15%);
2. Tidak mengajukan Daftar Usul Penilaian Angka Kredit yaitu sebanyak 150 orang (19,01%);
3. Masih dalam proses Penetapan Angka Kredit sebanyak 505 orang (64,01%);
4. Ketidaksiesuaian jabatan dengan tempat tugas sebanyak 35 orang (4,44%), dengan rincian sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Jabatan Fungsional</b>	<b>Unit Kerja</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Auditor	Dinas Pendapatan	1
2.	Dokter	Dinas Pendidikan	1
3.	Dokter Gigi	Dinas Pendidikan	1
4.	Guru TK	Biro Adm. Kemasyarakatan	6
5.	Instruktur	Badan Pendidikan dan Pelatihan	1
		BAPPEDA	1
6.	Pamong Budaya	Dinas Pendidikan	1
7.	Pekerja Sosial	BPBD	1
8.	Peneliti	Dinas Kesehatan	2
9.	Pengawas Ketenagakerjaan	BKD	1
10.	Pengendali Dampak Lingkungan	Dinas Perindustrian & Perdagangan	1
11.	Pengendali Ekosistem Hutan	Badan Lingkungan Hidup	1
		Dinas Pendapatan	1
12.	Penggerak Swadaya Masyarakat	BPKAD	1
		Dinas Perindustrian & Perdagangan	1
13.	Penyuluh Perindag	BPKAD	1
14.	Perancang Perundang-	Badan Diklat	1

	Undangan	Dinas Kesehatan	1
		Dinas Pendapatan	2
15.	Perawat	Dinas Sosial	9

5. Kewenangan pengangkatan dalam jabatan tidak berada di Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu sebanyak 11 orang (1,39%), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jabatan Fungsional	Unit Kerja	Jumlah
1.	Penyuluh KB (Lingkup kerja di Kab./Kota)	Badan Diklat	1
		BPPKB	1
		Dinas Pendapatan	1
		Disnakertransduk	1
2.	Penyuluh Pajak (Lingkup kerja di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan)	Dinas Pendapatan	3
		Satpol PP	1
3.	Dosen (Lingkup kerja di Instansi Pusat)	Dinas Kesehatan	3

Sehubungan dengan berbagai kendala yang ditemukan di lapangan tersebut, Badan Kepegawaian Daerah telah melakukan berbagai upaya sebagai berikut:

1. Terkait permasalahan tidak adanya diklat dasar jabatan fungsional sebagai syarat pengangkatan pertama dalam jabatan, maka upaya yang ditempuh oleh Badan Kepegawaian Daerah adalah dengan membuat surat penunjukan instansi pembina jabatan fungsional di daerah agar berkoordinasi dengan instansi pembina pusat dan juga dengan Badan Diklat Provinsi Jawa Timur jika diklat dasar fungsional tersebut diselenggarakan di Pemprov Jatim.
2. Terkait dengan PNS dalam formasi jabatan fungsional yang tidak segera mengajukan DUPAK untuk syarat pengangkatan dalam jabatan, maka Badan Kepegawaian Daerah menghubungi unit kerja yang bersangkutan untuk mengingatkan kembali PNS tersebut agar segera menyusun dan mengajukan

DUPAK sehingga PAK dapat segera ditetapkan dan persyaratan pengangkatan pertama dalam jabatan dapat terpenuhi. Dengan demikian formasi jabatan fungsional yang telah ditetapkan dapat dipenuhi.

3. Terkait dengan ketidaksesuaian jabatan dengan tempat tugas, maka ada dua langkah yang ditempuh oleh Badan Kepegawaian Daerah, yaitu:
  - a. untuk kepentingan Dinas, memindahkan yang bersangkutan ke unit kerja yang sesuai dengan tupoksi jabatannya sehingga memudahkan yang bersangkutan mengumpulkan angka kredit.
  - b. mengalihkan jabatan fungsional yang bersangkutan ke dalam jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan tupoksi di unit kerjanya.
4. Untuk pembinaan karier yang masih sulit untuk dilaksanakan adalah pembinaan karier pejabat fungsional Penyuluh Pajak karena kewenangan pengangkatannya berada di instansi pusat yaitu di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, sedangkan untuk mengalihfungsikan ke dalam jabatan fungsional lain yang ada di Pemprov. Jatim masih sulit dilakukan karena terkendala oleh latar belakang pendidikan yang bersangkutan yaitu D3 Perpajakan.

Dengan demikian kegiatan penempatan pegawai dalam jabatan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kompetensi, kualifikasi dan syarat jabatan adalah sebanyak 4.853 orang (86,02%).

Sehingga diketahui bahwa jumlah pegawai yang sesuai dengan kompetensinya sebanyak 20.024. dari jumlah pegawai yang sesuai dengan kompetensi apabila di bagi dengan jumlah PNS di lingkungan Pemprov. Jatim sebanyak 20.813 pegawai maka diketahui bahwa Persentase jumlah PNS Provins Jawa Timur yang sesuai dengan penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya sebanyak 20.024 atau 96,2 %.

- c. Seleksi pengisian lowongan jabatan secara terbuka

**Input** : Dana sebesar Rp. **389.519.900,-** terealisasi sebesar Rp.**232.512.118,-** Persentase capaiannya **60 %**

**Output** : - Persentase pengisian lowongan jabatan secara terbuka

**Outcome** : Persentase penataan SDM aparatur sesuai formasi kebutuhan

**Evaluasi kinerja :**

Pada tahun 2015 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur telah melakukan lelang jabatan secara terbuka untuk jenis jabatan tinggi pratama (eselon II) dengan dua tahap pelaksanaan diantaranya sebagai berikut :

**Pengisian JPT Pratama bulan September-Oktober 2015**

- a. Jabatan yang diisi:
  1. Kepala Biro Administrasi Perekonomian,
  2. Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD dr. Soetomo Surabaya; dan
  3. Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat.
- b. Pengumuman, pembukaan pendaftaran dan Seleksi Administrasi oleh Tim Sekretariat Panitia Seleksi Terbuka tanggal 28 September s/d 4 Oktober 2015.
- c. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi tanggal 5 Oktober 2015 melalui website Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur [www.bkd.jatimprov.go.id](http://www.bkd.jatimprov.go.id).

No.	Jabatan	Pelamar	Yang dinyatakan Lulus
1.	Kepala Biro Administrasi Perekonomian	14 Orang	9 Orang
2.	Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD dr. Soetomo Surabaya	9 Orang	6 Orang
3.	Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat	18 Orang	18 Orang

- d. Seleksi Kompetensi Manajerial (*Assessment*) tanggal 6-8 Oktober 2015. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan

Tim *Assessor* yang berada di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur;

- e. Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Manajerial (*Assessment*) tanggal 11 Oktober 2015 melalui website Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur [www.bkd.jatimprov.go.id](http://www.bkd.jatimprov.go.id) dan menelephon langsung peserta seleksi.

No.	Jabatan	Yang dinyatakan Lulus
1.	Kepala Biro Administrasi Perekonomian	9 Orang
2.	Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD dr. Soetomo Surabaya	6 Orang
3.	Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat	9 Orang

- f. Seleksi Wawancara Kompetensi Bidang oleh Panitia Seleksi tanggal 12-15 Oktober 2015;
- g. Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Manajerial (*Assessment*) dan Seleksi Wawancara Kompetensi Bidang tanggal 17 Oktober 2015.

No.	Jabatan	Yang dinyatakan Lulus
1.	Kepala Biro Administrasi Perekonomian	6 Orang
2.	Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD dr. Soetomo Surabaya	6 Orang
3.	Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat	6 Orang

- h. Panitia Seleksi memilih 3 (tiga) peserta dengan nilai tertinggi untuk masing-masing jabatan yang lowong selanjutnya diserahkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk dipilih 1 (satu) calon untuk setiap Jabatan untuk ditetapkan dan dilantik sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- i. Tanggal 2 Nopember 2015, Gubernur melantik:
1. Sdr. Dr. Ir. JUMADI, MMT sebagai Kepala Biro Administrasi Perekonomian;



2. Sdr. dr. ENDANG DAMAYANTI, M.Mkes, M.Hum sebagai Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD dr. Soetomo Surabaya; dan
  3. Sdr. SITI NURAHMI, SH, M.Si sebagai Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat.
- j. Sebelumnya juga telah dilaksanakan pengisian jabatan lowong secara terbuka untuk jabatan Tinggi Pratama yaitu :
1. Staf ahli bidang perekonomian dan keuangan
  2. Sekretariat Korpri

jadi kesimpulannya semua jabatan lowong sebanyak 5 jabatan lowong dengan target 70 % adapun realisasi 5 jabatan lowong terisi semua sebesar 70 % dimana formulasi perhitungannya jumlah jabatan lowong di bagi dengan pengisian jumlah jabatan yang diisi secara terbuka dengan terealisasi sebesar 100 %.

- d. Penetapan standar kompetensi jabatan dan pola karir

**Input** : Dana sebesar Rp. **314.234.880,-** terealisasi sebesar Rp.**238.404.500,-** Persentase capaiannya **76 %**

**Output** : - Persentase penyusunan standar kompetensi Jabatan  
- Persentase penyusunan rancangan peraturan gubernur

**Outcome** : Persentase penataan SDM aparatur sesuai dengan formasi kebutuhan

**Evaluasi kinerja :**

Untuk persentase SKPD dan UPT yang telah menyusun standart kompetensi jabatan pada tahun 2015 penyusunan standart kompetensi jabatan dilaksanakan untuk jabatan tinggi pratama (eselon II). dengan target persentase 75% atau 36 SKPD dengan realisasi sebesar 75% dengan asumsi untuk penyusunan standart kompetensi jabatan untuk jabatan tinggi pratama atau eselon III dengan capaian 100% artinya 49 SKPD sudah menyusun standar kompetensi jabatan untuk jabatan tinggi pratama (eselon II)

untuk tingkat persentase SKPD dan UPT yang menyusun pola karir pada tahun 2015 target 75 % atau 36 SKPD dengan realisasi 80 % atau 49 SKPD

dalam proses penyusunan draf Pergub pola karir yang mana titik tekan di pemprov jatim :

- Perencanaan kebutuhan selama 5 tahun kedepan dengan dokumen pemetaan pegawai
  - Redistribusi pegawai selama tahun 2015 hanya 20 SKPD dari 49 SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
  - usulan terkait promosi jabatan tentang jenjang karir
- e. Peningkatan kesejahteraan aparatur, penilaian prestasi dan sasaran kinerja pegawai serta penghargaan.

**Input** : Dana sebesar Rp. **1.617.013.000,-** terealisasi sebesar Rp.**1.578.480.988,-** Persentase capaiannya **98 %**

**Output** : - Persentase penyusunan rancangan peraturan gubernur  
- Persentase survey kebutuhan perumahan bagi pegawai di lingkungan pemprov  
- Persentase pembekalan kewirausahaan bagi PNS menjelang purna tugas  
- Persentase penganugrahan satyalancana karya satya bagi PNS Jawa Timur  
- Persentase evaluasi sasaran kinerja pegawai di lingkungan Pemprov Jatim.

**Outcome** : Persentase penetapan pemberian penghargaan kinerja pegawai yang obyektif, transparan dan akuntabel

**Evaluasi kinerja** :

No	Uraian	2014	2015	Ket
1.	Penyelesaian LP2P	10.747	8324	
2.	Penghargaan Satyalencana Karya Satya	984	6283	
3.	Pembekalan kewirausahaan menjelang purnatugas	80	120	
4.	Pelepasan purna tugas	100	-	
5.	Pemberian Rekomendasi Bapertarum	357	173	
6.	Penyelesaian Kartu Isteri/Suami	348	582	
7.	Pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS yang purna tugas	96	-	

7. Program pengembangan data informasi dengan 1 (satu) kegiatan yaitu :

Penguatan sistem informasi dan pengolahan database pegawai :

**Input** : Dana sebesar Rp.**2.335.536.000,-** terealisasi sebesar Rp.  
**2.226.129.051** Persentase capaiannya **95 %**

**Output** : - Persentase informasi dan data yang lengkap dan terupdate  
- Persentase bimtek kepegawaian  
- Persentase file kepegawaian(dokumen tata naskah kepegawaian) yang tertata

**Outcome** : Persentase database kepegawaian yang berkualitas, relevan, terkini, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan

#### **Evaluasi kinerja :**

Pada Tahun 2015 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur telah melakukan updating data kegiatan PU PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bertujuan untuk proses entri file data, updating data, dan proses peremajaan data secara terus menerus dan berkesinambungan dalam rangka untuk memvalidkan data pegawai agar data pegawai tersebut benar-benar berkualitas atau data tersebut handal, akurat, lengkap, dan dapat dipercaya. Data yang berkualitas yang akurat diperlukan proses up-dating yang terus menerus berkelanjutan selama PNS masih menjadi PNS, sampai dengan PNS tersebut pensiun atau meninggal dunia.

Hal ini menunjukkan bahwa BKD Provinsi Jawa Timur telah berupaya untuk mewujudkan tujuannya yaitu menjadikan BKD Provinsi Jawa Timur sebagai pusat informasi kepegawaian di Jawa Timur, salah satunya database kepegawaian harus terupdating, sehingga database kepegawaian tersebut dapat dipergunakan untuk keperluan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota terkait dengan kenaikan pangkat, penentuan pensiun, dan kebijakan-kebijakan lainnya terkait dengan permasalahan kepegawaian.

Updating data sangat diperlukan, apalagi terkait dengan UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga data PNS wajib diperbarui dan di updating, baik itu penyesuaian riwayat pendidikan, kepangkatan, nomenklatur, nama jabatan, dan uraian tugas maupun data lainnya.

Tabel 2.1

## Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD S/D Tahun 2015

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2015)	Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-1) 2014	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2015 (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					<b>Urusan Pemerintahan</b>					
					Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian					
<b>1</b>	<b>20</b>	<b>1700</b>	<b>01</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat/aparat terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2015)	Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-1) 2014	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2015 (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	20	1700	01	019	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	1. Persentase ketepatan penyelesaian administrasi surat sesuai SOP	100 %	100 %	100 %	100 %
						2. Persentase fasilitasi penyediaan makanan dan minuman dalam menunjang kegiatan BKD dan sekretariat sesuai SOP	100 %	100 %	100 %	100 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2015)	Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-1) 2014	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2015 (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	20	1700	02		<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi</b>	100 %	100 %	100 %	100 %
1	20	1700	02	012	Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	1. Persentase penerbitan buletin BKD 2. Persentase penyediaan sarana dan prasarana sesuai SOP	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %
1	20	1700	02	031	Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	100 %	100 %	100 %	100 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2015)	Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-1) 2014	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2015 (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	20	1700	07		<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase kelembagaan yang tepat fungsi</b>	100 %	100 %	100 %	100 %
1	20	1700	07	001	Koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah	Persentase dokumen rumusan kebijakan kepegawaian	100 %	100 %	100 %	100 %
1	20	1700	07	002	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pelayanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2015)	Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-1) 2014	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2015 (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	20	1700	08		<b>Program Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu</b>	100 %	100 %	100 %	100 %
1	20	1700	08	001	Penyusunan dokumen perencanaan	Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang sesuai aturan dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %
1	20	1700	08	002	Penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana program dan anggaran	Persentase laporan hasil pelaksanaan kegiatan	100 %	100 %	100 %	100 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2015)	Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-1) 2014	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2015 (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	20	1700	41		<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	<b>Prosentase penataan SDM aparatur sesuai formasi dan kebutuhan</b>	100 %	100 %	100 %	100 %
1	20	1700	41	019	Meningkatkan kompetensi SDM dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya	1. Persentase kegiatan ujian dinas dan penyesuaian ijazah 2. Persentase ujian seleksi Gol III/d ke IV/a 3. Persentase bimbingan teknis kepegawaian 4. Persentase fasilitasi tugas belajar 5. Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %
							100 %	100 %	100 %	100 %
							100 %	100 %	100 %	100 %
							100 %	100 %	100 %	100 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2015)	Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-1) 2014	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2015 (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						penyusunan rancangan peraturan gubernur.		100 %		
1	20	1700	41	084	Perencanaan kepegawaian dan formasi	Persentase bimbingan teknis kepegawaian	100 %	100 %	100 %	100 %
1	20	1700	41	089	Penyelenggaraan peningkatan disiplin dan kode etik pegawai serta penghargaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase penyelesaian pemberian/penolakan ijin perceraian dan perkawinan pegawai</li> <li>2. Persentase Bimtek kepegawaian</li> <li>3. Persentase Konsultasi</li> </ol>	100 %	100 %	100 %	100 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2015)	Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-1) 2014	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2015 (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						Pelanggaran Kepegawaian 4. Persentase Verifikasi LP2P 5. Persentase Sidak Disiplin Pegawai				
<b>1</b>	<b>20</b>	<b>1700</b>	<b>94</b>		<b>Program Penyelenggaraan Pelayanan Manajemen Aparatur</b>	<b>Porsentase penetapan pemberian penghargaan kinerja pegawai yang obyektif, transparan dan akuntabel</b>	100 %	100 %	100 %	100 %
1	20	1700	94	001	Seleksi Rekrutmen Pegawai yang Transparan dan Bebas KKN melalui Sistem CAT	1. Presentase Pelaksanaan rekrutmen CPNS 2. Presentase Pelaksanaan rekrutmen Capra IPDN	0	0	0	0
							0	0	0	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2015)	Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-1) 2014	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2015 (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	20	1700	94	002	Penataan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase BAPERJAKAT yang difasilitasi</li> <li>2. Persentase Pelantikan dan sertijab yang difasilitasi</li> <li>3. Persentase Penyelesaian Pensiun PNS yang difasilitasi</li> <li>4. Persentase proses Kenaikan Pangkat PNS antar SKPD dan PNS Kab./Kota</li> <li>5. Persentase penyelesaian proses Mutasi PNS antar SKPD, antar Kab.Kota, antar Provinsi</li> </ol>	100 %	100 %	100 %	100 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2015)	Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-1) 2014	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2015 (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						6. Persentase pengangkatan Jabatan Fungsional Tertentu				
1	20	1700	94	004	Seleksi pengisian lowongan jabatan secara terbuka	Persentase Pengisian lowongan jabatan secara terbuka	100 %	100 %	100 %	100 %
1	20	1700	94	005	Penetapan standart kompetensi jabatan dan pola karir	1. Persentase penyusunan standar kompetensi jabatan dan pola karir 2. Persentase penyusunan rancangan peraturan gubernur	100 %	100 %	100 %	100 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2015)	Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-1) 2014	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2015 (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	20	1700	94	006	Peningkatan kesejahteraan aparatur ,penilaian prestasi dan sasaran kinerja pegawai serta penghargaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase penyusunan rancangan peraturan gubernur</li> <li>2. Persentase survei Kebutuhan Perumahan Bagi Pegawai di lingk Pemprov JAtim</li> <li>3. Persentase pembekalan kewirausahaan bagi PNS menjelang masa purna tuga</li> <li>4. Persentase penganugrahan satyalancana karya satya bagi PNS Jawa Timur</li> </ol>	100 %	100 %	100 %	100 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2015)	Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-1) 2014	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2015 (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						5. Persentase evaluasi sasaran kinerja pegawai di lingkungan pemprov Jatim				
<b>1</b>	<b>20</b>	<b>1700</b>	<b>97</b>		<b>Program Pengembangan Data Informasi</b>	<b>Persentase database kepegawaian yang berkualitas, relevan, terkini, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan</b>	100 %	100 %	100 %	100 %
1	20	1700	97	007	Penguatan sistem informasi dan pengolahan database pegawai	1. Informasi dan Data/Dokumen Kepegawaian yang lengkap dan akurat di lingk. Pemprov Jatim	100 %	100 %	100 %	100 %



## 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis dan Penyusunan dan Penetapan SPM, pemerintah wajib menyusun SPM berdasarkan urusan wajib yang merupakan pelayanan dasar, sebagai bagian dari pelayanan publik. Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 selanjutnya mengatur tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Analisis Kemampuan dan Potensi Daerah.

Untuk analisis kinerja pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur akan diuraikan melalui penjelasan capaian tiap program kinerja pelayanan yang ada dan pada tahun 2016 kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur menunjukkan hasil yang baik dalam melaksanakan program dan arah kebijakan organisasi. Evaluasi program prioritas tahun anggaran 2016 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengakomodasi harapan masyarakat, dan image masyarakat untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan oleh BKD Provinsi Jawa Timur, kinerja aparat pelayanannya, dan fasilitasnya serta sebagai alat untuk membuat program-program dan kegiatan yang efektif dan tepat sasaran.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur dalam memberikan pelayanannya, dituntut untuk memberikan sebuah pelayanan prima kepada publik/masyarakat, khususnya pengguna jasa pelayanan, dalam hal ini PNS di Provinsi Jawa Timur maupun PNS dari Provinsi lainnya sehingga tercapai suatu kepuasan yang diwujudkan dalam nilai IKM. Nilai IKM dalam pelayanan tersebut mengacu Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yaitu terdiri dari 14 unsur penilaian yaitu: (1) Prosedur pelayanan,; (2) Persyaratan pelayanan,; (3) Keberadaan petugas pelayanan,; (4) Kedisiplinan petugas pelayanan,; (5) Kemampuan petugas pelayanan,; (6)

Kecepatan pelayanan,; (7) Keadilan mendapatkan pelayanan,; (8) Kesopanan petugas,; (9) Keramahan petugas ,; (10) Kewajaran biaya pelayanan,; (11) Kesesuaian biaya pelayanan,; (12) Kepastian jadwal pelayanan,; (13) Kenyamanan lingkungan,; (14) Keamanan pelayanan.

Pada tahun 2015 BKD Provinsi Jawa Timur menargetkan nilai IKM 84,2 terealisasi 84.24 sehingga capaian kinerjanya yaitu 100% atau dengan katagori "Baik", hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan yang diberikan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur memuaskan dan mendapatkan apresiasi yang baik oleh pengguna jasa pelayanan maupun oleh Pemerintah pusat. Berikut perkembangan nilai IKM, target dan realisasi mulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 tergambar pada tabel

**Tabel:  
Capaian Kinerja Pelayanan  
Tahun 2009-2015**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi							Capaian
	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 (baik)	82,63 (baik)	82,85 (baik)	83 (baik)	83,98 (baik)	83,98 (baik)	84 (Baik)	84,24 (baik)	83.52 (baik)

Image masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur itu baik, tidak terlepas dengan adanya program dan kegiatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan, mulai dari penerapan standart sistem manajemen ISO 9001:2008, penggunaan sarana IT secara on line sistem melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan didukung oleh SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawian) berbasis computer dan WEB yang terkoneksi keseluruhan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

Pada tahun 2009 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur mendapatkan apresiasi yang baik terhadap kinerja pelayanan, dan diberikan penghargaan oleh Badan sertifikasi dunia URS (United Register of Sistem) Nomor: Nomor 42179/A/001/UK/EN yaitu sertifikasi ISO: 9001:2008 sebagai penyelenggara pelayanan yang telah memenuhi standar mutu manajemen.

Pada tahun 2011 mendapatkan penghargaan BKN Award, Percontohan proyek penerimaan seleksi CPNS dengan system CAT (Computer Assisted Test), sebagai penyelenggaraan manajemen kepegawaian terbaik, dan sampai dengan tahun 2012 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur mendapatkan penghargaan BKN Award 2012 Tingkat Nasional dari Kepala BKN pada tanggal 30 Mei 2012 di gedung BKN Jakarta, Penghargaan BKN Award 2012 Tingkat Provinsi Jawa Timur dari Kepala Kantor Regional II BKN pada tanggal 30 Mei 2012 di gedung Kantor Regional II BKN di Jalan Jenderal S. Parman Waru – Sidoarjo. Hal ini membuktikan bahwa kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur sangat memuaskan.

### 2.3 Isu– Isu Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur ada beberapa Isu-isu strategis antara lain :

**Tabel 2.2**  
**Isu Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur**

<b>NO</b>	<b>ISU – ISU STRATEGIS</b>	<b>URAIAN</b>
1	Perkembangan Sosial Politik	<p>Penyelenggaraan manajemen kepegawaian daerah yang ditumpangi bahkan di dominasi oleh muatan dan kepentingan politik di masa datang cenderung akan mendistorsi pembinaan karier jabatan struktural. Terutama akan lebih kentara dalam pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian jabatan karier pada level manajerial tertentu yang tidak lagi berdasarkan pada kompetensi dan merupakan celah rawan terhadap campur tangan kekuatan politik serta kekuatan tertentu lainnya.</p> <p>Hal ini tentunya akan mengakibatkan orientasi pelayanan yang semestinya dijalankan dan dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat menjadi bergeser ke arah orientasi yang sifatnya politis dan pada gilirannya akan melahirkan politisasi birokrasi.</p>
2	Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	<p>Arus globalisasi dan revolusi telematika dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan merupakan tantangan</p>

		<p>tersendiri bagi upaya menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi akan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja penyelenggaraan manajemen kepegawaian. Namun demikian, apabila perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut tidak dimanfaatkan secara tepat dan tidak didukung oleh kualitas sumber daya aparatur yang memadai, tentunya hanya akan menghambat sistem penyelenggaraan manajemen kepegawaian secara keseluruhan.</p>
--	--	--

## 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 2.3  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017  
Provinsi Jawa Timur

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET	Pagu Indikatif (Rp)	Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET	Pagu Indikatif (Rp)
120.01	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran		Indeks Kepuasan Masyarakat/aparat ur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor	84,7	2.936.951.050	120.01	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran		Indeks Kepuasan Masyarakat/aparat ur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor	84,7	2.936.951.050
120.01.019	a Pelaksanaan administrasi perkantoran	Jawa Timur	1. Persentase ketepatan penyelesaian administrasi surat sesuai SOP 2. Persentase fasilitas penyediaan makanan dan minuman dalam menunjang kegiatan BKD dan sekretariat sesuai SOP	100% 100%	2.936.951.050	120.01.019	a Pelaksanaan administrasi perkantoran	Jawa Timur	1. Persentase ketepatan penyelesaian administrasi surat sesuai SOP 2. Persentase fasilitas penyediaan makanan dan minuman dalam menunjang kegiatan BKD dan sekretariat sesuai SOP	100% 100%	2.936.951.050
120.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	3.440.771.950	120.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	BKD	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	3.440.771.950
120.02.012	a Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Jawa Timur	1. Jumlah penerbitan buletin BKD 2. Persentase penyediaan sarana dan prasarana	4 buku 100%	1.112.547.150	120.02.012	a Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Jawa Timur	1. Jumlah penerbitan buletin BKD 2. Persentase penyediaan sarana dan prasarana	4 buku 100%	1.112.547.150

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET	Pagu Indikatif (Rp)	Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET	Pagu Indikatif (Rp)
120.02.031	b Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Jawa Timur	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	<b>100%</b>	2.328.224.800	120.02.031	b Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Jawa Timur	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	<b>100%</b>	2.328.224.800
<b>120.07</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah</b>	Jawa Timur	<b>Persentase kelembagaan yang tepat fungsi</b>	<b>100%</b>	<b>2.257.134.000</b>	<b>120.07</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah</b>	Jawa Timur	<b>Persentase kelembagaan yang tepat fungsi</b>	<b>100%</b>	<b>2.257.134.000</b>
120.07.001	a Koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah	Jawa Timur	Persentase dokumen rumusan kebijakan kepegawaian	<b>100%</b>	1.322.409.000	120.07.001	a Koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah	Jawa Timur	Persentase dokumen rumusan kebijakan kepegawaian	<b>100%</b>	1.322.409.000
120.07.002	b Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jawa Timur	Persentase pelayanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	<b>100%</b>	934.725.000	120.07.002	b Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jawa Timur	Persentase pelayanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	<b>100%</b>	934.725.000
<b>120.08</b>	<b>Program Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	Jawa Timur	<b>Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>440.000.000</b>	<b>120.08</b>	<b>Program Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	Jawa Timur	<b>Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>440.000.000</b>
120.08.001	a Penyusunan dokumen perencanaan	Jawa Timur	Jumlah dokumen perencanaan yang sesuai aturan dan tepat waktu	<b>4 dok</b>	154.990.000	120.08.001	a Penyusunan dokumen perencanaan	Jawa Timur	Jumlah dokumen perencanaan yang sesuai aturan dan tepat waktu	<b>4 dok</b>	154.990.000
120.08.002	b Penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana program dan anggaran	Jawa Timur	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan evaluasi laporan program dan kegiatan	<b>4 dok</b>	285.010.000	120.08.002	b Penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana program dan anggaran	Jawa Timur	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan evaluasi laporan program dan kegiatan	<b>4 dok</b>	285.010.000
<b>120.41</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>Porsentase penetapan pemberian penghargaan kinerja pegawai yang</b>	<b>100%</b>	<b>1.543.853.190</b>	<b>120.41</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>Porsentase penetapan pemberian penghargaan kinerja pegawai yang</b>	<b>100%</b>	<b>1.543.853.190</b>

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET	Pagu Indikatif (Rp)	Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET	Pagu Indikatif (Rp)
			<b>obyektif,transparan dan akuntabel</b>						<b>obyektif,transparan dan akuntabel</b>		
120.41.019	a Meningkatkan kompetensi SDM aparatur dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya	Jawa Timur	1. Jumlah Analisis kompetensi manajerial aparatur 2. Jumlah pegawai yang lulus ujian dinas dan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah 3. Jumlah pegawai yang lulus ujian kenaikan pangkat Pembina 4. Jumlah analisis kebutuhan aparatur yang menduduki JFT 5. Jumlah keg pembekalan jiwa entrepreneur 6. Jumlah Dok Grand Design manajemen ASN 7. Jumlah pegawai pembentukan assessor penilaian kompetensi teknis aparatur 8. Sertifikasi aparatur bidang TIK 9. Analisis Kebutuhan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	150 peg 300 peg 80 peg 49 SKPD 2 angk 1 dok 50 peg	858.959.090	120.41.019	a Kegiatan meningkatkan kompetensi SDM dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya	Jawa Timur	1. Jumlah Analisis kompetensi manajerial aparatur 2. Jumlah pegawai yang lulus ujian dinas dan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah 3. Jumlah pegawai yang lulus ujian kenaikan pangkat Pembina 4. Jumlah analisis kebutuhan aparatur yang menduduki JFT 5. Jumlah keg pembekalan jiwa entrepreneur 6. Jumlah Dok Grand Design manajemen ASN 7. Jumlah pegawai pembentukan assessor penilaian kompetensi teknis aparatur 8. Sertifikasi aparatur bidang TIK 9. Analisis Kebutuhan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	150 peg 300 peg 80 peg 49 SKPD 2 angk 1 dok 50 peg	858.959.090



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET	Pagu Indikatif (Rp)	Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET	Pagu Indikatif (Rp)
120.41.084	b Perencanaan kepegawaian dan formasi	Jawa Timur	1. Jumlah SKPD sosialisasi Pergub tentang jabatan fungsional pelaksana 2. Jumlah dokumen analisis kebutuhan aparatur JFU 3. Jumlah SKPD workshop penyusunan besetting dan formasi PNS melalui aplikasi e-formasi	49 SKPD  1 dok  87 SKPD	216.459.320	120.41.084	b Perencanaan kepegawaian dan formasi	Jawa Timur	1. Jumlah SKPD sosialisasi Pergub tentang jabatan fungsional pelaksana 2. Jumlah dokumen analisis kebutuhan aparatur JFU 3. Jumlah SKPD workshop penyusunan besetting dan formasi PNS melalui aplikasi e-formasi	49 SKPD  1 dok  87 SKPD	216.459.320
120.41.085	c Penyelenggaraan peningkatan disiplin dan kode etik pegawai serta penghargaan	Jawa Timur	1. Jumlah dokumen sidak disiplin pegawai 2. Jumlah dok penyelesaian pemberian/penolakan ijin perceraian dan perkawinan pegawai 3. Jumlah dok verifikasi LP2P 4. Jumlah dok konsultasi pelanggaran kepegawaian 5. Aplikasi e-presensi 6. Jumlah dok peraturan kepegawaian 7. Bimbingan Teknis Pembinaan Disiplin Pegawai 8. Bimbingan Teknis LP2P	1 dok  1 dok  1 dok  1 dok  1 dok  1 dok	468.434.780	120.41.085	c Penyelenggaraan peningkatan disiplin dan kode etik pegawai serta penghargaan	Jawa Timur	1. Jumlah dokumen sidak disiplin pegawai 2. Jumlah dok penyelesaian pemberian/penolakan ijin perceraian dan perkawinan pegawai 3. Jumlah dok verifikasi LP2P 4. Jumlah dok konsultasi pelanggaran kepegawaian 5. Aplikasi e-presensi 6. Jumlah dok peraturan kepegawaian 7. Bimbingan Teknis Pembinaan Disiplin Pegawai 8. Bimbingan Teknis LP2P	1 dok  1 dok  1 dok  1 dok  1 dok  1 dok	468.434.780
<b>120.94</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pelayanan Manajemen Aparatur</b>		<b>Porsentase penataan SDM aparatur sesuai dengan formasi kebutuhan</b>	<b>100%</b>	<b>3.536.288.360</b>	<b>120.94</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pelayanan Manajemen Aparatur</b>		<b>Porsentase penataan SDM aparatur sesuai dengan formasi kebutuhan</b>	<b>100%</b>	<b>3.536.288.360</b>

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET	Pagu Indikatif (Rp)	Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET	Pagu Indikatif (Rp)
120.94.001	a Seleksi Rekrutmen pegawai ASN yang transparan dan bebas KKN melalui system CAT	Jawa Timur	1. Penyusunan naskah soal TKB 2. Pelaksanaan ujian dengan system CAT 3. Pelaksanaan seleksi Praja IPDN 4. Pelaksanaan ujian TKD penerimaan Calon Praja IPDN 5. Seleksi administrasi pendaftaran dan pengolahan data pelamar umum ASN system CAT	1 kali 1 kali 1 kali	712.788.360	120.94.001	a Seleksi Rekrutmen pegawai ASN yang transparan dan bebas KKN melalui system CAT	Jawa Timur	1. Penyusunan naskah soal TKB 2. Pelaksanaan ujian dengan system CAT 3. Pelaksanaan seleksi Praja IPDN 4. Pelaksanaan ujian TKD penerimaan Calon Praja IPDN 5. Seleksi administrasi pendaftaran dan pengolahan data pelamar umum ASN system CAT	1 kali 1 kali 1 kali 84,7	712.788.360
120.94.002	b Penataan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi	Jawa Timur	1. Persentase Pelantikan dan sertijab 2. Persentase pegawai yang didistribusikan sesuai hasil pemetaan 3. Persentase rekomendasi pejabat struktural hasil evaluasi tim baperjakat 4. Persentase penyelesaian kenaikan pangkat pegawai ASN Jawa Timur 5. Persentase penyelesaian proses pensiun pegawai	100% 100% 100% 100% 100%	1.040.403.400	120.94.002	b Penataan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi	Jawa Timur	1. Persentase Pelantikan dan sertijab 2. Persentase pegawai yang didistribusikan sesuai hasil pemetaan 3. Persentase rekomendasi pejabat struktural hasil evaluasi tim baperjakat 4. Persentase penyelesaian kenaikan pangkat pegawai ASN Jawa Timur 5. Persentase penyelesaian proses pensiun pegawai	100% 100% 100% 100% 100%	1.040.403.400
120.94.004	c Seleksi pengisian lowongan jabatan secara terbuka	Jawa Timur	Persentase penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi dan kebutuhan	100%	783.096.600	120.94.004	c Seleksi pengisian lowongan jabatan secara terbuka	Jawa Timur	Persentase penempatan pejabat structural sesuai kompetensi dan kebutuhan	100%	783.096.600
120.94.005	d Penetapan standart kompetensi	Jawa Timur	1. Jumlah dokumen penyusunan pergub standar kompetensi	1 dok	200.000.000	120.94.005	d Penetapan standart kompetensi	Jawa Timur	1. Jumlah dokumen penyusunan pergub standar	1 dok	200.000.000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET	Pagu Indikatif (Rp)	Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET	Pagu Indikatif (Rp)
	jabatan dan pola karir		jabatan di lingkungan Pemprov Jatim 2. Pendamoingan dan fasilitasi penyusunan standar kompetensi jabatan eselon II 3. Jumlah dokumen penyusunan standar kompetensi jabatan tinggi pratama 4. Jumlah dokumen penyusunan pergub tentang pola karir	1 lap 1 dok 1 dok			jabatan dan pola karir		kompetensi jabatan di lingkungan Pemprov Jatim 2. Pendamoingan dan fasilitasi penyusunan standar kompetensi jabatan eselon II 3. Jumlah dokumen penyusunan standar kompetensi jabatan tinggi pratama 4. Jumlah dokumen penyusunan pergub tentang pola karir	1 lap 1 dok 1 dok	
120.94.006	e Peningkatan kesejahteraan aparatur ,penilaian prestasi dan sasaran kinerja pegawai serta penghargaan	Jawa Timur	1. Jumlah Bimtek penyusunan SKP 2. Jumlah laporan bimtek pengusulan satya lancana karya satya berbasis web 3. Jumlah laporan pembekalan kewirausahaan bagi ASN menjelang purna tugas 4. Jumlah dokumen pengusulan satyalancana karya satya nagi ASN 5. Jumlah dokumen evaluasi penilaian kinerja 6. Jumlah aplikasi e-SKP 7. Jumlah laporan penganugerahan satyalancana karya satya bagi ASN Provinsi Jawa Timur	1 kali 1 lap 1 lap 1 dok 1 dok 1 aplikasi 1 lap	800.000.000	120.94.006	d Peningkatan kesejahteraan aparatur ,penilaian prestasi dan sasaran kinerja pegawai serta penghargaan	Jawa Timur	1. Jumlah Bimtek penyusunan SKP 2. Jumlah laporan bimtek pengusulan satya lancana karya satya berbasis web 3. Jumlah laporan pembekalan kewirausahaan bagi ASN menjelang purna tugas 4. Jumlah dokumen pengusulan satyalancana karya satya nagi ASN 5. Jumlah dokumen evaluasi penilaian kinerja 6. Jumlah aplikasi e-SKP 7. Jumlah laporan	1 kali 1 lap 1 lap 1 dok 1 dok 1 aplikasi 1 lap	800.000.000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET	Pagu Indikatif (Rp)	Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET	Pagu Indikatif (Rp)
									penganagerahan satyalancana karya satya bagi ASN Provinsi Jawa Timur		
120.97	Program Pengembangan Data Informasi		Persentase database kepegawaian yang berkualitas, relevan, terkini, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan	100%	1.437.700.000	120.97	Program Pengembangan Data Informasi		Penyediaan Informasi dan Dokumentasi Data/Dokumen Kepegawaian	100%	1.437.700.000
120.97.007	a Penguatan sistem informasi dan pengolahan database pegawai	Jawa Timur	1. Aplikasi system informasi kepegawaian tenaga pendidik dan kependidikan 2. Persentase File tata naskah pegawai yang akurat	1 aplikasi  100%	1.437.700.000	120.97.007	a Kegiatan penguatan sistem informasi dan pengolahan database pegawai	Jawa Timur	1. Aplikasi system informasi kepegawaian tenaga pendidik dan kependidikan 2. Persentase File tata naskah pegawai yang akurat	1 aplikasi  100%	1.437.700.000
<b>Total Belanja Langsung</b>					<b>11.656.870.000</b>		<b>Total Belanja Langsung</b>			<b>11.656.870.000</b>	

## 2.5 Usulan Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur

Keberhasilan program dan kegiatan haruslah didukung dengan anggaran yang memadai, oleh sebab itu perlu juga perencanaan pendanaan indikatif Program dan Kegiatan Badan kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017.

**Tabel. 2.5**

### **Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017**

*Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur*

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
<b>I.</b>	<b>Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran</b>		<b>Indeks Kepuasan Masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor</b>	<b>100%</b>	
1.	Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	Jawa Timur	1. Persentase ketepatan penyelesaian administrasi surat sesuai SOP 2. Persentase fasilitasi penyediaan makanan dan minuman dalam menunjang kegiatan BKD dan sekretariat sesuai SOP	100%  100%	
<b>II.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana</b>		<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi</b>	<b>100%</b>	
1.	Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana	Jawa Timur	1. Jumlah penerbitan buletin BKD 2. Persentase penyediaan sarana dan prasarana	4 buku  100%	
2.	Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana	Jawa Timur	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	100%	
<b>III.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase kelembagaan yang tepat fungsi</b>	<b>100%</b>	
1.	Koordinasi dan konsultasi	Jawa	Persentase dokumen rumusan kebijakan kepegawaian	100%	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
	kelembagaan pemerintah daerah	Timur			
2.	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Jawa Timur	Persentase pelayanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	100%	
<b>IV.</b>	<b>Program Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan</b>		<b>Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu</b>	<b>100%</b>	
1.	Penyusunan dokumen perencanaan	Jawa Timur	Jumlah dokumen perencanaan yang sesuai aturan dan tepat waktu	4 buku	
2.	Penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana program dan anggaran	Jawa Timur	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan evaluasi laporan program dan kegiatan	4 buku	
<b>V.</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>		<b>Persentase penetapan pemberian penghargaan kinerja pegawai yang obyektif, transparan dan akuntabel</b>	<b>100%</b>	
1.	Meningkatkan kompetensi SDM dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab	Jawa Timur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Analisis kompetensi manajerial aparatur</li> <li>2. Jumlah pegawai yang lulus ujian dinas dan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah</li> <li>3. Jumlah pegawai yang lulus ujian kenaikan pangkat Pembina</li> <li>4. Jumlah analisis kebutuhan aparatur yang menduduki JFT</li> <li>5. Jumlah keg pembekalan jiwa entrepreneur</li> <li>6. Jumlah Dok Grand Design manajemen ASN</li> <li>7. Jumlah pegawai pembentukan assessor penilaian kompetensi teknis aparatur</li> <li>8. Sertifikasi aparatur bidang TIK</li> </ol>	<p>150 peg</p> <p>300 peg</p> <p>80 peg</p> <p>49 SKPD</p> <p>2 angk</p> <p>1 dok</p> <p>50 peg</p>	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
			9. Analisis Kebutuhan Pengembangan Sumber Daya Aparatur		
2.	Perencanaan kepegawaian dan formasi	Jawa Timur	1. Jumlah SKPD sosialisasi Pergub tentang jabatan fungsional pelaksana 2. Jumlah dokumen analisis kebutuhan aparatur JFU 3. Jumlah SKPD workshop penyusunan besetting dan formasi PNS melalui aplikasi e-formasi	49 SKPD 1 dok 87 SKPD	
3.	Penyelenggaraan peningkatan disiplin dan kode etik pegawai serta penghargaan	Jawa Timur	1. Jumlah dokumen sidak disiplin pegawai 2. Jumlah dok penyelesaian pemberian/penolakan ijin perceraian dan perkawinan pegawai 3. Jumlah dok verifikasi LP2P 4. Jumlah dok konsultasi pelanggaran kepegawaian 5. Aplikasi e-presensi 6. Jumlah dok peraturan kepegawaian 7. Bimbingan Teknis Pembinaan Disiplin Pegawai 8. Bimbingan Teknis LP2P	1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 aplikasi 1 dok 1 dok 1 lap 1 lap	
<b>VI.</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pelayanan Manajemen Aparatur</b>		<b>Porsentase penataan SDM aparatur sesuai dengan formasi kebutuhan</b>	<b>100%</b>	
1.	Seleksi Rekrutmen pegawai ASN yang transparan dan bebas KKN melalui system CAT	Jawa Timur	1. Penyusunan naskah soal TKB 2. Pelaksanaan ujian dengan system CAT 3. Pelaksanaan seleksi Praja IPDN 4. Pelaksanaan ujian TKD penerimaan Calon Praja IPDN 5. Seleksi administrasi pendaftaran dan pengolahan data pelamar umum ASN system CAT	1 kali 1 kali 1 kali	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
2.	Penataan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi	Jawa Timur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Pelantikan dan sertijab</li> <li>2. Persentase pegawai yang didistribusikan sesuai hasil pemetaan</li> <li>3. Persentase rekomendasi pejabat struktural hasil evaluasi tim baperjakat</li> <li>4. Persentase penyelesaian kenaikan pangkat pegawai ASN Jawa Timur</li> <li>5. Persentase penyelesaian proses pensiun pegawai</li> </ol>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	
3.	Seleksi pengisian lowongan jabatan secara terbuka	Jawa Timur	Persentase penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi dan kebutuhan	100%	
4.	Penetapan standart kompetensi jabatan dan pola karir	Jawa Timur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah dokumen penyusunan pergub standar kompetensi jabatan di lingkungan Pemprov Jatim</li> <li>2. Pendamoingan dan fasilitasi penyusunan standar kompetensi jabatan eselon II</li> <li>3. Jumlah dokumen penyusunan standar kompetensi jabatan tinggi pratama</li> <li>4. Jumlah dokumen penyusunan pergub tentang pola karir</li> </ol>	<p>1 dok</p> <p>1 lap</p> <p>1 dok</p> <p>1 dok</p>	
5.	Peningkatan kesejahteraan aparatur, penilaian prestasi dan sasaran kinerja pegawai serta penghargaan	Jawa Timur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Bimtek penyusunan SKP</li> <li>2. Jumlah laporan bimtek pengusulan satya lancana karya satya berbasis web</li> <li>3. Jumlah laporan pembekalan kewirausahaan bagi ASN menjelang purna tugas</li> <li>4. Jumlah dokumen pengusulan satyalancana karya satya nagi ASN</li> <li>5. Jumlah dokumen evaluasi penilaian kinerja</li> </ol>	<p>1 kali</p> <p>1 lap</p> <p>1 lap</p> <p>1 dok</p> <p>1 dok</p>	



No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
			6. Jumlah aplikasi e-SKP 7. Jumlah laporan penganugerahan satyalancana karya satya bagi ASN Provinsi Jawa Timur	1 aplikasi 1 lap	
<b>VI.</b>	<b>Program Pengembangan Data Informasi</b>		<b>Persentase database kepegawaian yang berkualitas, relevan, terkini, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan</b>	<b>100%</b>	
1.	Penguatan sistem informasi dan pengolahan database pegawai	Jawa Timur	1. Aplikasi sistem informasi kepegawaian tenaga pendidik dan kependidikan 2. Persentase File tata naskah pegawai yang akurat	1 aplikasi  100%	

Rencana pendanaan indikatif untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 dirinci sesuai sumber pendanaannya APBD Provinsi Jawa Timur sebesar Rp **11,656,870,000** (Sebelas Milyard Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Telaah Kebijakan**

Untuk mengimplementasikan strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi pedoman bagi perumusan dan operasionalisasi program lima tahun dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 dan terkait dengan agenda Gubernur Jawa Timur, salah satunya yaitu percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik ada 4 (empat) isu strategis yang perlu mendapat perhatian yaitu:

1. Upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kepegawaian dengan sasaran peningkatan kualitas tenaga pelayanan, kualitas sarana dan prasarana, kualitas mekanisme/prosedur/SOP pelayanan ditetapkan kebijakan:
  - a. Mengembangkan konsep indeks tingkat kepuasan masyarakat (IKM);
  - b. Mengembangkan sistem informasi layanan kepegawaian;
  - c. Meningkatkan standar mutu layanan kepegawaian dengan memperbaiki SOP pelayanan yang transparan, sederhana, tidak rumit, dan mudah dimengerti;
  - d. Mengembangkan dan peningkatan sarana prasarana pelayanan publik;
  - e. Pembangunan fasilitas pelayanan dalam rangka pengembangan jenis layanan;
  - f. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan pemanfaatan teknologi informasi (hardware dan software) sebagai pendukung utama kelembagaan.
2. Upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur atau PNS yang profesional dengan sasaran terwujudnya PNS yang memiliki pengetahuan, keterampilan, integritas, disiplin, dan perilaku kerja produktif yang amanah, serta berdedikasi tinggi ditetapkan kebijakan:
  - a. Mengembangkan sistem manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur berbasis kompetensi;
  - b. Mengembangkan nilai-nilai budaya kerja, etos kerja PNS dan kedisiplinan PNS;
  - c. Menegakkan aturan kepegawaian dan disiplin PNS;

3. Upaya meningkatkan kualitas penataan SDM Aparatur yang ideal atau *Right Sizing* sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya, ditetapkan kebijakan:
  - a. Pembagian tugas yang jelas sesuai dengan jabatan/keahlian sehingga setiap Pegawai mempunyai jabatan yang jelas, dan agar tidak terjadi inefisiensi dalam penggunaan Sumber Daya.
  - b. Pendistribusian pegawai sesuai dengan ketrampilan dan kompetensinya serta kebutuhan organisasi;
  - c. Pemetaan dan bezzeting SDM aparatur sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi secara rutin dan berkala dalam rangka menciptakan komposisi SDM Aparatur yang ideal berdasarkan Analisis jabatan dan Beban Kerja (ABK).
  - d. Menegakkan nilai-nilai netralitas, kedisiplinan PNS dan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.
4. Upaya meningkatkan kesejahteraan SDM Aparatur dengan sasaran terwujudnya peningkatan remunerasi sesuai dengan kebutuhan hidup dan pemberian reward berdasarkan sistem karir dan prestasi kerja ditetapkan kebijakan:
  - a. Meningkatkan pemberian penghargaan, reward, dan kompensasi berbasis kinerja dan menyusun pedoman pemberian reward (selain kenaikan pangkat);
  - b. Pembekalan bagi SDM Aparatur yang akan purna tugas;
  - c. Pemberian tambahan penghasilan bagi SDM Aparatur yang akan purna tugas.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian Daerah**

Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam Renstra Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. Maka visi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur itu harus diarahkan pada upaya berkesinambungan pembangunan untuk mewujudkan percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik dalam pengembangan dan pengelolaan sumberdaya aparatur daerah untuk meningkatkan kemakmuran dengan berlandaskan akhlak mulia.

Dengan semangat itu, maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur untuk kurun waktu 2014-2019 akan mewujudkan visi :

**“Mewujudkan Aparatur Birokrasi Jawa Timur Lebih Bersih,  
Profesional dan Sejahtera”**

Berdasarkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka selanjutnya dijabarkan ke dalam Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur untuk menyelaraskan gerak dan langkah mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Adapun misi yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur 2014-2019 adalah sebagai berikut :

**“Memberikan Kontribusi Optimal terwujudnya SDM Aparatur Lebih bersih,  
Profesional dan Sejahtera melalui Penyelenggaraan Pelayanan Manajemen  
Aparatur Berkualitas”**

Misi ini dimaksudkan agar BKD Provinsi Jawa Timur melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian, mulai dari perencanaan pegawai yang berbasis kebutuhan riil instansi, penataan pegawai berprinsip In The Right Man In The Right Place dan sesuai kebutuhan (Right Sizing), pendistribusian pegawai sampai dengan pengevaluasian kinerja pegawai, serta berkomitmen memberikan kontribusi yang optimal dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian di Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Dalam rangka untuk mewujudkan misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur ditetapkan tujuan strategis sebagai berikut:

**a. Mewujudkan penataan Sumber Daya Manusia Aparatur yang memiliki keahlian, pengetahuan, sikap dan perilaku yang sesuai dengan kebutuhan**

Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh peningkatan kualitas penataan SDM Aparatur Sipil Negara yang memiliki keahlian, pengetahuan, sikap dan perilaku sesuai dan kebutuhan.

## **b. Mewujudkan sistem informasi database kepegawaian ASN yang terintegrasi**

Terwujudnya sistem informasi database kepegawaian ASN yang terintegrasi dengan penilaian kinerja termasuk peta jabatan dan integrasi sistem aplikasi pencatatan kerja pegawai dengan pengisian dokumen analisis jabatan, analisis beban kerja dan sasaran kerja pegawai.

## **c. Mewujudkan pegawai ASN yang disiplin, integritas dan berkinerja tinggi**

Terbentuknya pegawai ASN yang disiplin, integritas dan berkinerja tinggi (termasuk penghargaan dan sanksi administratif) berdasarkan hasil pendataan calon penerima penghargaan SATYA LANCANAKARYA SATYA (X,XX,XXX Tahun) secara online dan penyelesaian kasus kepegawaian.

Sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur disusun berdasarkan hasil indentifikasi potensi permasalahan internal dan eksternal untuk mencapai tujuan. Sasaran strategis merupakan ukuran kinerja dari tujuan strategis organisasi yang dapat direncanakan dan dilaksanakan setiap tahunnya. Adapun sasaran strategis BKD Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

### **a. Meningkatkan kualitas penataan SDM Aparatur.**

Dengan mempertimbangkan misi Gubernur Jawa Timur, terutama untuk pelaksanaan reformasi birokrasi, maka ditetapkan indikator-indikator keberhasilan sasaran strategis ini mencakup Persentase penataan pegawai yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan dilaksanakan melalui penataan pegawai yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan sehingga didalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab, oleh karena itu pada sasaran didukung indikator-indikator keberhasilan yang mencakup; (1) Prosentase ASN yang didistribusikan dalam rangka penataan dan pemenuhan kebutuhan, indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa banyak Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur memenuhi kekurangan pegawai yang berdasarkan pada hasil pemetaan; (2) Persentase ASN yang dialihfungsikan dari jabatan fungsional umum atau administrasi ke jabatan fungsional tertentu dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional, indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui berapa banyak pegawai dengan jabatan

fungsional umum atau administrasi yang berlebihan di seluruh SKPD (hasil pemetaan) dialihfungsikan menjadi jabatan fungsional tertentu untuk memenuhi kekurangan jabatan fungsional tertentu dan rekrutmen CPNS dengan sistem CAT.

**b. Meningkatnya kualitas data pegawai ASN yang Akurat.**

Pelaksanaan akurasi database pegawai Tahun 2014 hanya PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sedangkan akurasi database guru SMA/SMK pelaksanaanya pada Tahun 2017.

**c. Meningkatnya disiplin dan penilaian kinerja pegawai ASN**

Pelaksanaan pelayanan secara online dalam pemberian penghargaan SATYA LANCANA KARYA SATYA dimaksudkan untuk lebih meningkatkan motivasi pegawai ASN yang bertujuan tercapainya SDM Aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera dengan indikator perilaku kerja dari tingkat kehadiran pegawai ASN, indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa banyak pelanggaran yang dilakukan oleh ASN karena kriteria ASN yang berkualitas salah satunya disiplin, taat hukum, dan tidak melakukan pelanggaran khususnya pelanggaran peraturan kepegawaian dan kode etik dan perilaku pegawai dan juga pelanggaran terkait masalah pidana yang dilakukan oleh ASN, indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa banyak ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh ASN dan meningkatnya kedisiplinan pegawai ASN melalui penggunaan presensi elektronik yang terhubung dengan sistem database kepegawaian ASN

**Tabel 3.1**  
**RENCANA KINERJA TAHUNAN**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR**

**Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur**

**Tahun Anggaran : 2017**

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>Meningkatnya Kualitas Penataan SDM Aparatur</b>	Persentase penataan SDM aparatur sesuai dengan formasi kebutuhan dan kompetensi	100%
<b>Meningkatnya Kompetensi ASN di Lingkungan Provinsi Jawa Timur</b>	Persentase ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mengikuti uji kompetensi dan lulus	85%
<b>Meningkatnya Kualitas Data Pegawai ASN yang Akurat</b>	Persentase tingkat akurasi database kepegawaian	85%
<b>Meningkatnya Disiplin dan Penilaian Kinerja Pegawai ASN</b>	Persentase capaian rata-rata kumulatif atas sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai ASN	90%

### 3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2017

Program dan kegiatan berdasarkan urusan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2017 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program-program tersebut berjumlah 7 Program diantaranya :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
4. Program Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

6. Program Penyelenggaraan Pelayanan Manajemen Aparatur
7. Program Pengembangan Data Informasi

Dan dijabarkan dengan 16 kegiatan diantaranya :

1. Pelaksanaan administrasi perkantoran
2. Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana
3. Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan parasarana
4. Koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah
5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur
6. Penyusunan dokumen perencanaan
7. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana program dan anggaran
8. Meningkatkan kompetensi SDM dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya
9. Perencanaan kepegawaian dan formasi
10. Penyelenggaraan peningkatan disiplin dan kode etik pegawai serta penghargaan
11. Seleksi Rekrutmen pegawai ASN yang transparan dan bebas KKN melalui system CAT
12. Penataan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi
13. Seleksi pengisian lowongan jabatan secara terbuka
14. Penetapan standart kompetensi jabatan dan pola karir
15. Peningkatan kesejahteraan aparatur, penilaian prestasi dan sasaran kinerja pegawai serta penghargaan
16. Kegiatan penguatan sistem informasi dan pengolahan database pegawai

### **3.4 Rumusan Rencana Kinerja Pembangunan Daerah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 sebagai berikut:**

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator kinerja program pelayanan administrasi perkantoran adalah sebagai berikut :

#### **Indikator Kinerja Program :**

Indeks Kepuasan Masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor

#### **Indikator Kinerja Kegiatan :**

- a. Persentase ketepatan penyelesaian administrasi surat sesuai SOP



- b. Persentase fasilitasi penyediaan makanan dan minuman dalam menunjang kegiatan BKD dan sekretariat sesuai SOP

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Indikator kinerja program peningkatan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut :

**Indikator Kinerja Program :**

Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi

**Indikator Kinerja Kegiatan :**

- a. Jumlah penerbitan buletin BKD
- b. Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana kantor
- c. Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana kantor

3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

**Indikator Kinerja Program :**

Persentase kelembagaan yang tepat fungsi

**Indikator Kinerja Kegiatan :**

- a. Persentase dokumen rumusan kebijakan kepegawaian
- b. Persentase pelayanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu

4. Program Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan

Indikator kinerja Program Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan adalah sebagai berikut :

**Indikator Kinerja Program :**

Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu

**Indikator Kinerja Kegiatan :**

- a. Jumlah dokumen perencanaan yang sesuai aturan dan tepat waktu
- b. Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan evaluasi laporan program dan kegiatan

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur adalah sebagai berikut :

**Indikator Kinerja Program :**

Persentase penetapan pemberian penghargaan kinerja pegawai yang obyektif, transparan dan akuntabel

**Indikator Kinerja Kegiatan :**

- a. Jumlah Analisis kompetensi manajerial aparatur

- b. Jumlah pegawai yang lulus ujian dinas dan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah
  - c. Jumlah pegawai yang lulus ujian kenaikan pangkat Pembina
  - d. Jumlah analisis kebutuhan aparatur yang menduduki JFT
  - e. Jumlah keg pembekalan jiwa entrepreneur
  - f. Jumlah Dok Grand Design manajemen ASN
  - g. Jumlah pegawai pembentukan assessor penilaian kompetensi teknis aparatur
  - h. Sertifikasi aparatur bidang TIK
  - i. Analisis Kebutuhan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
  - j. Jumlah SKPD sosialisasi Pergub tentang jabatan fungsional pelaksana
  - k. Jumlah dokumen analisis kebutuhan aparatur JFU
  - l. Jumlah SKPD workshop penyusunan besetting dan formasi PNS melalui aplikasi e-formasi
  - m. Jumlah dokumen sidak disiplin pegawai
  - n. Jumlah dok penyelesaian pemberian/penolakan ijin perceraian dan perkawinan pegawai
  - o. Jumlah dok verifikasi LP2P
  - p. Jumlah dok konsultasi pelanggaran kepegawaian
  - q. Aplikasi e-presensi
  - r. Jumlah dok peraturan kepegawaian
  - s. Bimbingan Teknis Pembinaan Disiplin Pegawai
  - t. Bimbingan Teknis LP2P
6. Program Penyelenggaraan Pelayanan Manajemen Aparatur adalah sebagai berikut :

**Indikator Kinerja Program :**

Porsentase penataan SDM aparatur sesuai dengan formasi kebutuhan

**Indikator Kinerja Kegiatan :**

- a. Penyusunan naskah soal TKB
- b. Pelaksanaan ujian dengan system CAT
- c. Pelaksanaan seleksi Praja IPDN
- d. Pelaksanaan ujian TKD penerimaan Calon Praja IPDN
- e. Seleksi administrasi pendaftaran dan pengolahan data pelamar umum ASN system CAT

- f. Persentase Pelantikan dan sertijab
- g. Persentase pegawai yang didistribusikan sesuai hasil pemetaan
- h. Persentase rekomendasi pejabat struktural hasil evaluasi tim baperjakat
- i. Persentase penyelesaian kenaikan pangkat pegawai ASN Jawa Timur
- j. Persentase penyelesaian proses pensiun pegawai
- k. Persentase penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi dan kebutuhan
- l. Jumlah dokumen penyusunan pergub standar kompetensi jabatan di lingkungan Pemprov Jatim
- m. Pendamoingan dan fasilitasi penyusunan standar kompetensi jabatan eselon II
- n. Jumlah dokumen penyusunan standar kompetensi jabatan tinggi pratama
- o. Jumlah dokumen penyusunan pergub tentang pola karir
- p. Jumlah Bimtek penyusunan SKP
- q. Jumlah laporan bimtek pengusulan satya lancana karya satya berbasis web
- r. Jumlah laporan pembekalan kewirausahaan bagi ASN menjelang purna tugas
- s. Jumlah dokumen pengusulan satyalancana karya satya nagri ASN
- t. Jumlah dokumen evaluasi penilaian kinerja
- u. Jumlah aplikasi e-SKP
- v. Jumlah laporan penganugerahan satyalancana karya satya bagi ASN Provinsi Jawa Timur

7. Program Pengembangan Data Informasi adalah sebagai berikut :

**Indikator Kinerja Program :**

Persentase database kepegawaian yang berkualitas, relevan, terkini, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan

**Indikator Kinerja Kegiatan :**

- a. Aplikasi system informasi kepegawaian tenaga pendidik dan kependidikan
- b. Persentase File tata naskah pegawai yang akurat

### **3.5 Kelompok Sasaran**

Kelompok Sasaran Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019 adalah Seluruh Aparatur Sipil Negara Baik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/ Kota se Jawa Timur

**Tabel 3.2**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017**

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	
<b>120.01</b>	<b>Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor</b>	BKD	<b>84,7</b>	<b>2.936.951.050</b>	APBD	
<b>120.01.019</b>	a. Pelaksanaan administrasi perkantoran	1. Persentase ketepatan penyelesaian administrasi surat sesuai SOP 2. Persentase fasilitasi penyediaan makanan dan minuman dalam menunjang kegiatan BKD dan sekretariat sesuai SOP	BKD	100%  100%	<b>2.936.951.050</b>	APBD	
<b>120.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi</b>	BKD	<b>100%</b>	<b>3.440.771.950</b>	APBD	
120.02.012	a Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana	1. Jumlah penerbitan buletin BKD 2. Persentase penyediaan sarana dan prasarana	BKD	4 buletin  100%	1.112.547.150	APBD	
120.02.031	b Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	BKD	100%	2.328.224.800	APBD	
<b>120.07</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase kelembagaan yang tepat fungsi</b>		<b>100%</b>	<b>2.257.134.000</b>	APBD	
120.07.001	a Koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah	Persentase dokumen rumusan kebijakan kepegawaian	Pemprov Jatim	100%	1.322.409.000	APBD	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	
120.07.002	b Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Persentase pelayanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	Pemprov Jatim	100%	934.725.000	APBD	
<b>120.08</b>	<b>Program Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan</b>	<b>Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu</b>	BKD	<b>100%</b>	<b>440.000.000</b>	APBD	
120.08.001	a Penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang sesuai aturan dan tepat waktu	BKD	4 dok	154.990.000	APBD	
120.08.002	b Penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana program dan anggaran	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan evaluasi laporan program dan kegiatan	BKD	4 dok	285.010.000	APBD	
<b>120.41</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	<b>Porsentase penetapan pemberian penghargaan kinerja pegawai yang obyektif,transparan dan akuntabel</b>		<b>100%</b>	<b>1.543.853.190</b>	APBD	
_120.41.019	a Meningkatkan kompetensi SDM dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Analisis kompetensi manajerial aparatur</li> <li>2. Jumlah pegawai yang lulus ujian dinas dan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah</li> <li>3. Jumlah pegawai yang lulus ujian kenaikan pangkat Pembina</li> <li>4. Jumlah analisis kebutuhan aparatur yang</li> </ol>	Pemprov Jatim	200 peg 300 peg 80 peg 49 SKPD	858.959.090	APBD	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	
		menduduki JFT 5. Jumlah keg pembekalan jiwa entrepreneur 6. Jumlah Dok Grand Design manajemen ASN 7. Jumlah pegawai pembentukan assessor penilaian kompetensi teknis aparatur 8. Sertifikasi aparatur bidang TIK 9. Analisis Kebutuhan Pengembangan Sumber Daya Aparatur		2 angk  1 dok  50 peg			
120.41.084	b Perencanaan kepegawaian dan formasi	1. Jumlah SKPD sosialisasi Pergub tentang jabatan fungsional pelaksana 2. Jumlah dokumen analisis kebutuhan aparatur JFU 3. Jumlah SKPD workshop penyusunan besetting dan formasi PNS melalui aplikasi e-formasi	Pemprov Jatim	49 SKPD  1 dok  87 SKPD	216.459.320	APBD	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	
120.41.085	c Penyelenggaraan peningkatan disiplin dan kode etik pegawai serta penghargaan	1. Jumlah dokumen sidak disiplin pegawai 2. Jumlah dok penyelesaian pemberian/penolakan ijin perceraian dan perkawinan pegawai 3. Jumlah dok verifikasi LP2P 4. Jumlah dok konsultasi pelanggaran kepegawaian 5. Aplikasi e-presensi 6. Jumlah dok peraturan kepegawaian 7. Bimbingan Teknis Pembinaan Disiplin Pegawai 8. Bimbingan Teknis LP2P	Pemprov Jatim		468.434.780	APBD	
<b>120.94</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pelayanan Manajemen Aparatur</b>	<b>Porsentase penataan SDM aparatur sesuai dengan formasi kebutuhan</b>	Pemprov Jatim	100%	<b>3.536.288.360</b>	APBD	
120.94.001	a Seleksi Rekrutmen pegawai ASN yang transparan dan bebas KKN melalui system CAT	1. Penyusunan naskah soal TKB 2. Pelaksanaan ujian dengan system CAT 3. Pelaksanaan seleksi Praja IPDN 4. Pelaksanaan ujian TKD penerimaan Calon Praja IPDN	Pemprov Jatim	1 kali 1 kali 1 kali 1 kali	712.788.360	APBD	



KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	
		5. Seleksi administrasi pendaftaran dan pengolahan data pelamar umum ASN system CAT		1 kali			
120.94.002	b Penataan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi	1. Persentase Pelantikan dan sertijab 2. Persentase pegawai yang didistribusikan sesuai hasil pemetaan 3. Persentase rekomendasi pejabat struktural hasil evaluasi tim baperjakat 4. Persentase penyelesaian kenaikan pangkat pegawai ASN Jawa Timur 5. Persentase penyelesaian proses pensiun pegawai	Pemprov Jatim	100% 100% 100% 100% 100%	1.040.403.400	APBD	
120.94.004	c Seleksi pengisian lowongan jabatan secara terbuka	Persentase penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi dan kebutuhan	Pemprov Jatim	100%	783.096.600	APBD	
120.94.005	d Penetapan standart kompetensi jabatan dan pola karir	1. Jumlah dokumen penyusunan pergub standar kompetensi jabatan di lingkungan Pemprov Jatim 2. Pendamoingan dan fasilitasi penyusunan standar kompetensi jabatan eselon II 3. Jumlah dokumen	Pemprov Jatim	1 dok  1 lap  1 dok	200.000.000	APBD	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	
		penyusunan standar kompetensi jabatan tinggi pratama 4. Jumlah dokumen penyusunan pergub tentang pola karir		1 dok			
120.94.006	d Peningkatan kesejahteraan aparatur ,penilaian prestasi dan sasaran kinerja pegawai serta penghargaan	1. Jumlah Bimtek penyusunan SKP 2. Jumlah laporan bimtek pengusulan satya lancana karya satya berbasis web 3. Jumlah laporan pembekalan kewirausahaan bagi ASN menjelang purna tugas 4. Jumlah dokumen pengusulan satyalancana karya satya nagi ASN 5. Jumlah dokumen evaluasi penilaian kinerja 6. Jumlah aplikasi e-SKP 7. Jumlah laporan penganugerahan satyalancana karya satya bagi ASN Provinsi Jawa Timur	Pemprov Jatim	1 kali  1 lap  1 lap  1 dok  1 dok  1 aplikasi 1 lap	800.000.000	APBD	
<b>120.97</b>	<b>Program Pengembangan Data Informasi</b>	<b>Persentase database kepegawaian yang berkualitas, relevan, terkini, lengkap dan</b>			<b>1.437.700.000</b>	APBD	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	
		<b>dapat dipertanggungjawabkan</b>					
120.97.007	<b>a</b> Penguatan sistem informasi dan pengolahan database pegawai	1. Aplikasi system informasi kepegawaian tenaga pendidik dan kependidikan 2. Persentase File tata naskah pegawai yang akurat	BKD	1 aplikasi  100%	1.437.700.000	APBD	
	<b>Total Belanja Langsung</b>				<b>11.656.870.000</b>		

**Tabel 3.3**  
**Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2017**  
**Dan Prakiraan Maju Tahun 2018**  
**Provinsi Jawa Timur**

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana tahun 2017 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana tahun 2018				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
1	20	01		<b>Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor</b>	BKD Prov. Jatim	<b>84,7</b>	<b>2.936.951.050</b>	APBD	Program Pendukung Operasional SKPD (Rutin) sebagai sarana penunjang pelayanan publik di bidang kepegawaian	<b>84,8</b>	<b>597.295.390</b>
1	20	01	019	Pelaksanaan administrasi perkantoran	1. Persentase ketepatan penyelesaian administrasi surat sesuai SOP 2. Persentase fasilitasi penyediaan makanan dan minuman dalam menunjang kegiatan BKD dan sekretariat sesuai SOP	BKD Prov. Jatim	100%	2.936.951.050	APBD		100%	597.295.390
1	20	02		<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi</b>	BKD Prov. Jatim	<b>100%</b>	<b>3.440.771.950</b>	APBD	Program Pendukung Operasional SKPD (Rutin) sebagai sarana penunjang pelayanan publik di bidang kepegawaian	100%	<b>3.467.700.000</b>
1	20	02	012	Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan	1. Jumlah penerbitan buletin BKD	BKD Prov. Jatim	4 buku	1.112.547.150	APBD		5 buku	1.445.000.000

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana tahun 2017 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	20	02	031	prasarana	2. Persentase penyediaan sarana dan prasarana	BKD Prov. Jatim	100%	100%	2,022,700,000
1	20	07		Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	BKD Prov. Jatim	100%	100%	2,022,700,000
1	20	07		<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase kelembagaan yang tepat fungsi</b>	BKD Prov. Jatim	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1,627,450,000</b>
1	20	07	001	Koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah	Persentase dokumen rumusan kebijakan kepegawaian	BKD Prov. Jatim	100%	100%	701,800,000
1	20	07	002	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pelayanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	BKD Prov. Jatim	100%	100%	925,650,000
1	20	08		<b>Program Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Persentase dokumen pemerintahan yang disusun tepat waktu</b>	BKD Prov. Jatim	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1,107,050,000</b>
1	20	08	001	Penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang sesuai aturan dan tepat waktu	BKD Prov. Jatim	4 dok	4 dok	344,850,000
1	20	08	002	Penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana program dan anggaran	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan evaluasi laporan program dan kegiatan	BKD Prov. Jatim	4 dok	4 dok	762,200,000
1	20	41		<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	<b>Porsentase penetapan pemberian penghargaan kinerja pegawai yang</b>	Jawa Timur	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>9,849,400,000</b>

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana tahun 2017 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana tahun 2018				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
1	20	41	019	Meningkatkan kompetensi SDM aparatur dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya	obyektif,transparan dan akuntabel 1. Jumlah Analisis kompetensi manajerial aparatur 2. Jumlah pegawai yang lulus ujian dinas dan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah 3. Jumlah pegawai yang lulus ujian kenaikan pangkat Pembina 4. Jumlah analisis kebutuhan aparatur yang menduduki JFT 5. Jumlah keg pembekalan jiwa entrepreneur 6. Jumlah Dok Grand Design manajemen ASN 7. Jumlah pegawai pembentukan assessor penilaian kompetensi teknis aparatur 8. Sertifikasi aparatur bidang TIK 9. Analisis Kebutuhan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Jawa Timur	150 peg 300 peg 80 peg 49 SKPD 2 angk 1 dok 50 peg	858.959.090	APBD	4 : "Percepatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik" dan Pemikiran Dasar Nawa Cita "Melakukan Revolusi arakter Bangsa (Revolusi Mental) "	250 peg 500 peg 100 peg 49 SKPD 2 angk 1 dok 70 peg	4,658,500,000
1	20	41	084	Perencanaan kepegawaian dan formasi	1. Jumlah SKPD sosialisasi Pergub tentang jabatan fungsional pelaksana 2. Jumlah dokumen analisis kebutuhan aparatur JFU 3. Jumlah SKPD workshop penyusunan besetting dan	Jawa Timur	49 SKPD 1 dok 87 SKPD	216.459.320	APBD		49 SKPD 1 dok 87 SKPD	998,250,000

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana tahun 2017 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana tahun 2018				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
1	20	41	085	Penyelenggaraan peningkatan disiplin dan kode etik pegawai serta penghargaan	formasi PNS melalui aplikasi e-formasi 1. Jumlah dokumen sidak disiplin pegawai 2. Jumlah dok penyelesaian pemberian/penolakan ijin perceraian dan perkawinan pegawai 3. Jumlah dok verifikasi LP2P 4. Jumlah dok konsultasi pelanggaran kepegawaian 5. Aplikasi e-presensi 6. Jumlah dok peraturan kepegawaian 7. Bimbingan Teknis Pembinaan Disiplin Pegawai 8. Bimbingan Teknis LP2P	Jawa Timur	1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 apl 1 dok 1 lap 1 lap	468.434.780	APBD		1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 apl 1 dok 1 lap 1 lap	2,861,650,000
1	20	94		<b>Program Penyelenggaraan Pelayanan Manajemen Aparatur</b>	<b>Porsentase penataan SDM aparatur sesuai dengan formasi kebutuhan</b>	Jawa Timur	<b>100%</b>	<b>3.536.288.360</b>	APBD	Program Prioritas Gubernur terkait dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur misi ke 4 :		<b>9,431,434,206</b>
1	20	94	001	Seleksi Rekrutmen pegawai ASN yang transparan dan bebas KKN melalui system CAT	1. Penyusunan naskah soal TKB 2. Pelaksanaan ujian dengan system CAT 3. Pelaksanaan seleksi Praja IPDN 4. Pelaksanaan ujian TKD penerimaan Calon Praja IPDN 5. Seleksi administrasi pendaftaran dan pengolahan data pelamar umum ASN system CAT	Jawa Timur	1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali	712.788.360	APBD	" <b>Percepatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik</b> " dan Pemikiran Dasar Nawa Cita " <b>Melakukan Revolusi arakter Bangsa (Revolusi Mental)</b> "	1 kali 1 kali 1 kali 1 kali	4,300,000,000
1	20	94	002	Penataan pegawai sesuai	1. Persentase Pelantikan dan	Jawa	100%	1.040.403.400	APBD		100%	1,400,000,000

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana tahun 2017 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	dengan kebutuhan dan kompetensi	sertijab 2. Persentase pegawai yang didistribusikan sesuai hasil pemetaan 3. Persentase rekomendasi pejabat struktural hasil evaluasi tim baperjakat 4. Persentase penyelesaian kenaikan pangkat pegawai ASN Jawa Timur 5. Persentase penyelesaian proses pensiun pegawai	Timur	100%				100%	
1	20 94 004	Seleksi pengisian lowongan jabatan secara terbuka	Jawa Timur	100%	783.096.600	APBD		100%	1,100,000,000
1	20 94 005	Penetapan standart kompetensi jabatan dan pola karir	Jawa Timur	1 dok	200.000.000	APBD		1 dok	500,000,000
				1 lap				1 lap	
				1 dok				1 dok	
				1 dok				1 dok	
1	20 94 006	Peningkatan kesejahteraan aparatur ,penilaian prestasi dan sasaran kinerja pegawai serta penghargaan	Jawa Timur	1 kali	800.000.000	APBD		1 kali	1,131,434,206
				1 lap				1 lap	



Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana tahun 2017 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana tahun 2018		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	20	97		3. Jumlah laporan pembekalan kewirausahaan bagi ASN menjelang purna tugas 4. Jumlah dokumen pengusulan satyalancana karya satya bagi ASN 5. Jumlah dokumen evaluasi penilaian kinerja 6. Jumlah aplikasi e-SKP 7. Jumlah laporan penganugerahan satyalancana karya satya bagi ASN Provinsi Jawa Timur	Jawa Timur	100%	1.437.700.000	APBD	Program Prioritas Gubernur terkait dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur misi ke 4 :	1 lap 1 dok 1 dok 1 aplikasi 1 lap  <b>100%</b>  <b>2,254,951,159</b>
1	20	97	007	Penguatan sistem informasi dan pengolahan database pegawai	Jawa Timur	1 aplikasi	1.437.700.000	APBD	<b>"Percepatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik"</b> dan Undang - Undang No 23 Tahun 2014 ttg pemerintah Daerah kewenangan Pengelolaan pendidikan menengah oleh pemerintah Provinsi di tahun 2017	1 aplikasi  100%  2,254,951,159

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur untuk tahun anggaran 2017. Kesiapan sumber daya manusia, pendanaan dan ketatalaksanaan serta komitmen dari pimpinan dan staf Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Renja ini. Keberhasilan pelaksanaan Renja juga akan sangat menentukan pencapaian target-target kinerja dalam Renstra 2014–2019.

Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2017 ini harus menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara akuntabel dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur. Selain digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2017, Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya manusia Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur, dan hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mewujudkan good governance di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.

Surabaya,      Juni 2016

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR**

ttd

**SISWO HEROETOTO, S.H., M.Hum., M.M.**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19580227 198503 1 007